



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PASURUAN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAIFULLAH YUSUF
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 35190

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 15.151.898.000

1. Tanah Seluas 3670 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.985.920.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Bangunan Seluas 102 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/250 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.788.000
5. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 410.190.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 3850 m2/1000 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 870.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPARD G Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 600.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 3.000.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.254.973.203**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 26.876.871.203



III. HUTANG

Rp. 392.311.442

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 26.484.559.761

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.